BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. *The Dictionary of world Politics* mengartikan Hubungan Internasional sebagai suatu istilah yang digunakan untuk melihat seluruh interaksi antara aktor-aktor negara dengan melewati batas-batas negara (Perwita dan Yani, 2005: 4).

Hubungan Internasional juga didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan subnasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu. Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku para aktor negara maupun non-negara, didalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional (Ma'soed; 1994: 28).

Berakhirnya masa Perang Dingin di dalam hubungan internasional, terjadi perubahan mendasar pada konstelasi politik secara global. Berpindahnya skematik politik dari sistem bipolar menjadi multipolar mengawali berbagai perkembangan di dalam hubungan internasional. Arah perubahan tersebut menyebabkan adanya tingkat interdependensi negara-negara di dunia, baik itu dalam masalah politik,

keamanan, ekonomi dan juga lingkungan hidup. Ketergantungan tersebut juga mengacu pada menguatnya dampak dari proses globalisasi yang berlangsung hingga saat ini.

Pertahanan suatu negara merupakan faktor utama dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Suatu negara tidak akan bisa menjaga eksistensinya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri apabila belum mampu untuk mempertahankan diri dari ancaman tersebut. Oleh karena eratnya kaitan pertahanan negara dengan harkat dan martabat suatu bangsa, maka dengan adanya pertahanan negara yang memadai (Postur Pertahanan yang Kuat) akan membuat bangsa lain tidak memandang sebelah mata terhadap bangsa kita (http://www.tandef.net/pertahanan-negara-merupakan-cermin-dari-martabat-bangsa-dan-negara, diakses 2 Mei 2009).

Dengan era reformasi yang sedang dilaksanakan di Indonesia dan dengan keadaan luas wilayah Indonesia yang besar juga terdapat pulau-pulau kecil serta terdiri dari bermacam-macam suku, Indonesia mempunyai tantangan tersendiri dalam menjaga keutuhannya. Dilihat dari luas wilayah, Indonesia membutuhkan Angkatan Laut serta Angkatan Udara yang mampu menjaga wilayahnya agar tidak ada pihak yang mengganggu kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mampu untuk mengatasi segala bentuk tindakan yang dapat memecah belah keutuhan negara (disintegrasi bangsa). TNI berperan penting dalam menjaga kedaulatan NKRI, oleh karena itu kemampuan atau kapabilitas TNI sebagai ujung tombak dalam memperkuat pertahanan dan keamanan NKRI harus ditingkatkan.

Dalam melakukan tugasnya untuk menjaga pertahanan dan keamanan NKRI, TNI dapat bekerjasama pula dengan rakyat, karena konsep utama strategi pertahanan adalah melakukan pembinaan dari rakyat sebagai unsur utama dari entitas bangsa tersebut.

Seperti yang dikutip dari tulisan Gogor Nurharyoko, dalam uraian ini dibahas konsep pertahanan nasional RI. Sistematis pertahanan RI harus disusun dalam urutan sebagai berikut.

1. Penumbuhan kesadaran rakyat dalam konteks pertahanan nasional. Hakekat ancaman keberadaan bangsa dan potensi-potensi ancaman tersebut khususnya bentuk, asal dan tujuannya dari ancaman-ancaman tersebut harus dibina dan ditanamkan pada seluruh rakyat. Hal ini bisa dicapai dengan penyuluhan lewat media-media pekabaran dan penerangan langsung lewat siaran radio, TV, pendidikan pentingnya kesadaran bela negara mulai dari SD hingga PTN.
2. Mengajak rakyat untuk ikut giat dalam formasi pertahanan itu sendiri dalam arti yang sebenarnya. Di sini diusulkan untuk dibentuk dua jenis unsur pertahanan. Yang pertama adalah unsur pertahanan inti (*central core-defence entity*) yang berupa tentara profesional dan digaji pemerintah pusat dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya. Yang ke-dua adalah unsur pertahanan teritorial (*territorial defence entity*) yang personilnya adalah rakyat yang berdinas secara periodik dan bersifat wajib dengan pembiayaan di serahkan pada pemerintah daerah. Kedua unsur pertahanan ini harus di koordinir dalam suatu format komando gabungan yang diatur secara sinergi antara pemerintah pusat dengan daerah. Ada pun secara kematraan, unsur

pertahanan teritorial sesuai dengan namanya hanya akan mencakup satu matra, yakni matra darat sedangkan unsur pertahanan inti akan memiliki tiga matra yakni darat, laut dan udara.

3. Pembentukan dan pengorganisasian badan intelijen yang memadai dan ber redundansi tinggi. Pada era informasi saat ini pengadaan badan intelijen yang berkemampuan seperti di atas sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi. Badan intelijen ini akan berfungsi untuk pendukung pengadaan data yang akurat guna pelaksanaan operasi operasi pertahanan baik yang akan dilakukan oleh unsur pertahanan inti maupun teritorial atau gabungan keduanya. Badan intelijen ini harus dipisahkan secara organisasi dari unsur-unsur pertahanan di atas akan tetapi harus diberikan mekanisme yang sedemikian sehingga bisa menjalankan tugasnya sebagai unsur pengadaan data pengedali operasi secara terintegrasi dalam sistim nasional pertahanan.
4. Kemandirian kemampuan sarana dan prasarana pertahanan. Khususnya perlengkapan militer yang harus di usahakan untuk di buat sendiri di dalam negeri. Mulai dari yang sederhana seperti seragam dinas sampai alat-alat berat. Pencapaian tujuan ini bisa dilakukan dengan mulai membeli lisensi pembuatan perangkat militer dilanjutkan dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dengan melibatkan kerjasama unsur-unsur pemerintah, swasta dan universitas untuk alih teknologi pembuatan perangkat militer tersebut. Dalam konteks ini harus dibuat urutan peringkat. Peringkat pertama adalah kebutuhan pembentukan unit infanteri (contoh: seragam dinas, senjata serbu, radio taraf regu dan kompi, pengadaan jeep dan truk). Selanjutnya bisa

diteruskan ke pembuatan perangkat militer yang lain. Jika keuangan memungkinkan, maka bisa juga seluruh proses dilakukan sejajar.

5. Meningkatkan persahabatan dengan negara negara tetangga, khususnya di wilayah regional (ASEAN) dalam konteks ekonomi, perdagangan, industri dan kebudayaan. Dengan semikian akan tercapai suatu sikap saling mengerti, yang dapat mencegah konflik yang bisa berakibat negatif pada sistim nasional pertahanan RI. Pengadaan latihan bersama juga bisa dilakukan dengan intensif (http://www.ksatrian.or.id/kajian/hanri-3.htm, diakses 26 April 2009).

Kebutuhan pertahanan dan keamanan Indonesia meliputi beberapa kekuatan, seperti kekuatan laut, kekuatan udara, kekuatan darat, badan intelijen pertahanan, dan jaringan pertahanan nasional (http://www.dephan.go.id/, diakses 26 Februari 2009). Seperti yang ditulis oleh Gogor Nurharyoko, berikut ini data tentang kapabilitas yang dimiliki TNI pada tahun 2002, kekuatan laut, fungsi utama kekuatan laut pada masa damai adalah mengamankan wilayah samudra serta menciptakan suasana keamanan yang kondusif untuk kegiatan ekonomi. Dalam keadaan perang kekuatan laut kita sedapat mungkin memiliki kemampuan untuk menahan serbuan musuh di laut dan jika perlu harus sanggup menumpas kekuatan musuh sebelum mendarat ke pantai pantai RI. Di sini konsep penghancuran kekuatan musuh akan dipusatkan pada konteks pertahanan pantai dalam artian empasisnya tetap pada proyeksi kekuatan yang terbatas. Dalam melaksanakan tugas tersebut kekuatan udara akan memberikan dukungan penuh pada kekuatan laut. Untuk pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan armada kapal perang dari kategori *frega*t dan perusak didukung oleh sejumlah besar kapal selam

pantai dan kapal penyerang cepat. Kekuatan laut juga harus dilengkapi dengan sejumlah kapal pengangkut pasukan dalam jumlah yang memadai untuk mendukung kelancaran operasi amfibi (http://www.ksatrian.or.id/kajian/hanri-1.htm, diakses 26 April 2009). Angkatan Laut (AL) Indonesia memiliki total 113 KRI (Kapal Republik Indonesia) meliputi kapal tempur, kapal patroli, dan kapal pendukung terdiri dari kapal yang berusia di bawah 10 tahun sampai di atas 30 tahun, kapal *Fregat* 35 tahun, korvet 22 tahun, kapal cepat torpedo 14 tahun, kapal selam 21 tahun (Kompas, 7 Oktober 2002). Selain kekuatan laut yang menjadi pertahanan Indonesia di bidang maritim, diperlukan juga kekuatan udara yang menjaga wilayah udara dan memonitor wilayah laut yaitu kekuatan udara, pada masa damai kekuatan udara akan berfungsi utama untuk mengamankan wilayah udara serta ikut memonitor wilayah lautan, berkoordinasi dengan kekuatan laut. Pada masa perang, kekuatan udara akan berfungsi untuk menghancurkan musuh di laut dalam rangka membantu kekuatan laut. Jadi di sini fungsi kekuatan udara sangat taktis dan tidak dimaksudkan untuk memiliki potensi proyeksi kekuatan yang besar. Kekuatan udara juga berfungsi sebagai sarana angkutan gerak cepat ke titik-titik konflik di seluruh wilayah nasional (http://www.ksatrian.or. id/kajian/hanri-1.htm, diakses 26 April 2009). Angkatan Udara (AU) Indonesia memiliki 222 pesawat terbang TNI AU, pesawat tempur 89 unit, radar pertahanan udara 16 unit (Kompas, 7 Oktober 2002). Tak lepas dari kekuatan laut dan udara, kekuatan darat juga sangat diperlukan untuk mempertahankan wilayah nasional dengan mendayagunakan seluruh potensi yang ada di dalam masing-masing wilayah dengan menjadikan rakyat sebagai unsur utama dalam pelaksanaan hal

tersebut. Kekuatan darat akan dibagi dalam dua formasi yakni kekuatan darat inti dan kekuatan darat teritorial. Penjelasan masing masing kekuatan adalah sebagai berikut. Kekuatan darat inti akan beranggotakan militer profesional yang dihasilkan melalui pendidikan militer yang dilola oleh pemerintah pusat. Anggota kekuatan darat inti akan dibekali dengan pengetahuan yang memadai untuk melakukan strategi dan taktik perang gabungan dengan melibatkan unsur-unsur kesenjataan darat, laut dan udara. Anggota pasukan darat inti harus memiliki kualifikasi untuk melaksanakan 4 jenis operasi yakni: operasi komando, operasi lintas udara, operasi amfibi dan operasi anti teroris. Kekuatan darat inti akan diperlengkapi dengan unsur infanteri yang tetap menjadi tulang punggungnya, lalu unsur artileri, unsur kavaleri dan unsur kavaleri udara. Kekuatan darat inti akan bertumpu pada suatu entitas tempur yang berdaya tahan tinggi, berdaya tembak tinggi dan mampu bergerak cepat (http://www.ksatrian.or.id/kajian/hanri-2.htm, diakses 26 April 2009). Angkatan Darat (AD) Indonesia memiliki kendaraan tempur jenis tank dan panser rata-rata di atas 40 tahun, tank *Scorpion* 16 tahun (Kompas, 7 Oktober 2002).

Dengan kondisi serba terbatas, kemampuan TNI mengantisipasi apalagi mengatasi ancaman yang mungkin muncul di kawasan Asia Pasifik agaknya meragukan. Sementara, angkatan perang kita masih tertatih-tatih untuk bangkit di bawah tekanan embargo Amerika Serikat dan keterbatasan anggaran dari negara, sejak awal tahun 1990-an negara-negara Asia Pasifik telah dan sedang meningkatkan kekuatan militernya. Negara-negara di kawasan diperkirakan telah membeli atau memproduksi dengan lisensi kurang lebih 3.000 pesawat militer,

termasuk di dalamnya 1.500 pesawat tempur (*fighters and strike aircrafts*) dan 400 kapal perang. Sejak tahun 1998 anggaran militer negara-negara kawasan menunjukkan peningkatan. Bahkan, dengan perhitungan dollar AS, Asia Timur meningkat dari 94,62 milyar dollar AS menjadi 108,73 milyar dollar AS, Asia Tenggara dari 12,6 milyar AS menjadi 14,26 milyar dollar AS, Asia Selatan dari 14,55 milyar dollar AS menjadi 19,59 milyar dollar AS. Menurut data *International Institute for Strategic Studies, 2000-2001* itu, pengecualian terjadi pada kawasan Australasia (Australia dan Selandia Baru), yang mengalami penurunan dari 7,98 milyar dollar AS menjadi 7,278 milyar dollar AS. Bandingkan dengan Indonesia yang anggaran pertahanannya hanya Rp 12.754,94 milyar atau hanya 3,71 persen dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Anggaran pertahanan Indonesia sebesar itu hanya cukup untuk membeli separuh kapal perusak *USS Paul Hamilton* milik AS. Jepang, memiliki enam buah kapal *destroyer* sejenis *Paul Hamilton* itu (Kompas, 7 Oktober 2002).

Sehubungan dengan semakin membaiknya hubungan Indonesia dan Amerika Serikat, kedua negara mengadakan Dialog Kerjasama Keamanan Amerika Serikat-Indonesia (*Indonesia–U.S. Security Dialogue/IUSSD*). Selain dialog, bentuk kerjasama juga dilakukan dalam latihan bersama dan bantuan militer. Dengan adanya hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, membuka jalan bagi TNI untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam berbagai sektor.

Tujuan dilaksanakan *Indonesia–U.S. Security Dialogue* adalah untuk membangun suatu saluran komunikasi dua arah antar Dephan dan institusi militer kedua negara, menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara untuk

dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan nasional dan pertahanan, adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah masing-masing sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya, dalam dialog-dialog ini juga terungkap tentang adanya komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mendukung integritas wilayah NKRI dari Sabang sampai (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008, http://www.dephan.go.id/, diakses 26 Februari 2009).

Dapat dilihat dalam seminar se-Asia Pasifik di Surabaya yang dihadiri oleh Komandan Marinir AS Letjen Wallage Gregson yang datang sebagai pembicara. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak 23 hingga 25 April 2002 itu dibuka oleh Komandan Korps Marinir TNI Mayjen TNI (Mar) Harry Triono, dia mengatakan, kegiatan itu merupakan gagasan dari Komandan Marinir AS untuk Kawasan Pasifik Letjen Earl B Hailston. Menurutnya, selain diikuti oleh 80 anggota Marinir TNI AL, kegiatan ini juga melibatkan pasukan Kostrad, Paskhas TNI AU dan Brimob masing-masing dua personel. Sedangkan peserta luar negeri berasal dari AS, Australia, Malaysia, dan Filipina (Republika, 24 April 2002).

Pada IUSSD I pada tanggal 24–25 April 2002 bertempat di Hotel Borobudur Jakarta. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Mayjen TNI Sudrajat MPA, Dirjen Strahan Dephan dengan anggota sebanyak 43 orang terdiri dari unsur militer, polisi, sipil, diplomat dari Indonesia dan Amerika Serikat. Peserta dari Indonesia sebanyak 31 orang terdiri dari delegasi utama 17 orang dan delegasi pendukung 14 orang. Sedangkan delegasi AS dipimpin oleh Richard

Lawless, *Deputy Assistant Secretary of Defence for Asian and Pacific Affairs* dengan anggota berjumlah 12 orang. Dalam dialog tersebut, Delegasi AS menyampaikan masalah *Regional Security Situation, National Security Issues, DOD Strategy and Budget Formulation, Countering Terorism in the Pacific.* Sedangkan Delegasi Indonesia menyampaikan masalah *Regional Security Situation, Indonesia Security Issues, Masalah Piracy, Masalah New Paradigm and Internal Reform of TNI* (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008, http://www.dephan.go.id/, diakses 26 Februari 2009).

Semenjak IUSSD I tersebut, upaya Indonesia dalam Reformasi TNI dan untuk mengantisipasi situasi keamanan yang masih rawan konflik antar negara di kawasan didukung Amerika Serikat.

Dialog kerjasama keamanan Amerika Serikat-Indonesia (IUSSD) telah dilaksanakan enam kali mulai dari tahun 2002-2008, ilustrasi pelaksanaannya ditunjukkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Jadwal IUSSD yang telah dilaksanakan

IUSSD	Waktu	Tempat
IUSSD I	24 – 25 April 2002	Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia
IUSSD II	22-23 April 2004	Departemen Pertahanan AS, Pentagon, Washington D. C. , Amerika Serikat
IUSSD III	2-3 Agustus 2005	Timor Room, Hotel Borobudur, Jakarta, Indonesia
IUSSD IV	Sesi Pertama: 24-25 April 2006 Sesi Kedua: 26 – 27 April 2006	*National Defence University*, Washington D. C. Amerika Serikat

IUSSD V	18-19 April 2007	Departemen Pertahanan, Jakarta, Indonesia
IUSSD VI	15-16 April 2008	Washington D.C., Amerika Serikat

sumber: Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008

Hubungan kerjasama pertahanan RI-AS telah kembali dibuka pada 2004 dengan dilaksanakannya pertemuan *Indonesian-United State Security Dialogue* (IUSSD) IV di Washington DC. Pada pertemuan itu, disepakati pelaksanaan *Bilateral Defence Dialogue* (USIBDD) yang terhenti sejak 1998. Dalam forum dialog keempat USIBDD di Jakarta pada 2004, disepakati untuk membentuk enam kelompok kerja yang akan mewadahi kerjasama dalam bidang intelijen, latihan, pendidikan, logistik, komunikasi serta sains dan teknologi pertahanan. Sedangkan pada pertemuan USIBDD ke-5 di Hawaii, kedua pihak sepakat untuk mengurangi jumlah kelompok kerja dari enam menjadi empat, yang meliputi bidang *Intelligent Working Group* (IWG), *Training Events Working Group* (TEWG), *Logistics and Security Assistance Working Group* (LSAWG) dan *Education and Specific Programms Working Group* (ESPWG). Pengurangan itu, tidak berarti AS membatasi jumlah program yang diberikan kepada RI, melainkan pemadatan dari program yang sebelumnya telah diberikan. Amerika Serikat dan Indonesia sepakat untuk mengadakan kerjasama *military – to military* antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Asia Pasifik Amerika Serikat (*US Pasific Command/USPACOM*). Pasca Embargo, TNI-USPACOM Fokuskan Kerjasama Pendidikan dan Latihan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Komando Asia Pasifik Amerika Serikat (*US Pasific Command/USPACOM*) memfokuskan kerjasama bidang pelatihan dan pendidikan bagi para perwira,

dalam program kerjasama pertahanan TNI-USPACOM Tahun Anggaran (TA) 2006. Pada TA 2006 kerjasama antara TNI dan USPACOM meliputi 174 kegiatan, ke-174 kegiatan itu dilakukan oleh keempat kelompok kerja (*working group*) yang berada di bawah panitia kerja eksekutif (*executive working committee*/EWC), yang meliputi pendidikan dan latihan intelijen (tiga kegiatan), logistik dan bantuan keamanan (empat kegiatan), *training events working group* (42 kegiatan) serta *education and specific programm* sebanyak 125 kegiatan. Seluruh kegiatan itu ada yang dilakukan di Indonesia, Selandia Baru, AS dan negara lain. Keseluruhannya ini bertujuan meningkatkan kemampuan dan keahlian prajurit dan perwira TNI, baik di tataran taktis, strategis, logistik dan operasional (http://www.tni.mil.id/news.php?q=dtl&id=113012006115459, diak ses 29 Maret 2009).

Berikut beberapa poin singkat menyangkut pertahanan dan keamanan dalam IUSSD I-IUSSD VI:

1. Indonesia menyampaikan masalah dalam negeri dan menyampaikan kendala serta upaya mengatasi masalah tersebut. Delegasi AS menjelaskan tentang perubahan strategi Dephan dan Angkatan Bersenjata AS dalam menyikapi perubahan situasi keamanan dunia, serta implikasinya terhadap negara-negara di Asia.
2. Delegasi R.I. menyampaikan penjelasan tentang pembajakan di laut wilayah RI beserta upaya yang telah diambil untuk menanggulanginya, dan tentang Reformasi TNI. Delegasi AS menjelaskan tentang kebijakan AS dalam bidang kontra terorisme.

3. Delegasi kedua negara sepakat bahwa dialog sangat penting artinya sebagai pilar bertumpunya hubungan antar Indonesia dan AS. Disamping itu juga disepakati untuk meningkatkan frekwensi komunikasi antara Menhan kedua negara dan juga antara perwakilan masing-masing Menhan.
4. Pihak AS menjelaskan fungsi-fungsi TNI.
5. Delegasi Indonesia mengharapkan agar pihak AS dapat mengirimkan sejumlah peralatan militer milik TNI.
6. Delegasi Indonesia mengharapkan agar AS dapat memberikan bantuan untuk peningkatan kemampuan TNI dalam konteks *Peacekeeping Operations.* Delegasi AS menyampaikan agar pihak Indonesia mengajukan surat permohonan ke pihak AS untuk diproses.
7. Kerjasama *International Military Education and Training (*IMET), *Foreign Military Financing (*FMF), dan *Foreign Military Sales (*FMS).
8. Pihak Indonesia menginginkan penambahan jumlah dana (Program IMET).
9. Delegasi AS menyatakan bahwa pada saat ini (Tahun Anggaran 2006) telah tersedia dana untuk membantu Indonesia membeli peralatan atau pelatihan sekitar $US 1 M untuk TNI melalui program FMF; serta merencanakan untuk mengajukan kepada kongres dana anggaran untuk TNI untuk TA 2007 sekitar $US 6.5 M, yang umumnya diperuntukkan bagi kebutuhan keamanan maritim.
10. *Security Assistance Program* (FMS/FMF/IMET/EDA/1206) *Overview*, yang menawarkan berbagai program bantuan keamanan yang akan membantu TNI dalam mengembangkan kemampuan atau dalam profesional TNI.

11. *Re-engagement* TNI (termasuk Komando Pasukan Khusus). Dalam kerangka peningkatan kerja sama kedua negara (Ditkersin Ditjen Strahan, November 2008, http://www.dephan.go.id/, diakses 26 Februari 2009).

Hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat yang dibangun atas dasar saling menghormati dan kemitraan yang sejajar merupakan kepentingan nasional kedua negara. Kedua negara bertekad untuk memperdalam serta memperkuat hubungan yang penting ini dan bekerjasama guna mewujudkan perdamaian serta kemakmuran dunia (http://www.deplu.go.id/?press_id=192, diakses 26 Februari 2009).

Dari pemaparan diatas maka peneliti merasa tertarik untuk mengangkat judul: **"Pengaruh Kerjasama Pertahanan Dan Keamanan Amerika Serikat-Indonesia Melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* Terhadap Peningkatan Kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)"**.

Ketertarikan peneliti terhadap penelitian ini didukung oleh beberapa mata kuliah Ilmu Hubungan Internasional yaitu antara lain seperti:

1. Pengantar Hubungan Internasional, merupakan peletak dasar bagi penelitian yang akan dilakukan, terkait hubungan para aktor yang melewati batas-batas negara.
2. Politik Internasional, karena fokus studi dari permasalahan yang akan diteliti menyangkut keterhubungan pemerintahan suatu negara dengan negara lain yang didalamnya dilibatkan peranan aktor non-negara, terkait dalam memperjuangkan kepentingan *(interest)* dan kekuasaan *(power)*.

3. Politik Luar Negeri RI, dalam kaitannya dengan kebijakan luar negeri Indonesia dalam berinteraksi dengan negara lain.
4. Diplomasi HI di Amerika Serikat, yang menguraikan fakta-fakta sejumlah diplomasi yang terkait serta berbagai perkembangan yang sudah atau masih berlangsung dewasa ini di kawasan Amerika.

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yaitu merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah, dimana suatu objek dalam suatu sistem tertentu dapat kita kenali sebagai masalah. Identifikasi masalah sendiri bisa dikatakan sebagai adanya upaya untuk menjelaskan suatu fenomena pada situasi tertentu (Suriasumantri, 1998 : 309).

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* diadakan?
2. Bagaimana kondisi kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum IUSSD dilaksanakan?
3. Kesepakatan apa saja yang dibuat dalam IUSSD?
4. Kendala-kendala yang muncul dalam merealisasikan kesepakatan dalam IUSSD.
5. Bagaimanakah peningkatan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pasca dilaksanakannya IUSSD?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah merupakan suatu upaya untuk menetapkan batas-batas permasalahan dengan jelas, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang termasuk kedalam lingkup permasalahan dan faktor mana saja yang tidak (Suriasumantri, 1998 : 311).

Peneliti menganalisis kerjasama pertahanan dan keamanan Amerika Serikat-Indonesia melalui IUSSD sebagai objek penelitian. Dengan mengambil ruang lingkup dalam IUSSD dan apa saja yang dihasilkan, terutama masalah dana dan Alutsista TNI dalam kurun waktu 2002-2008.

Pada tahun 2002 IUSSD pertama dilaksanakan dan 2008 merupakan pelaksanaan IUSSD yang terakhir, yang mana dalam kerjasama tersebut terdapat program-program yang dihasilkan atau dilanjutkan, serta kendala-kendala dalam merealisasikan hasil kerjasama tersebut dalam upaya meningkatkan kapabilitas TNI.

1.4 Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas, peneliti dapat menemukan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

”Bagaimana Pengaruh Kerjasama Pertahanan Dan Keamanan Amerika Serikat-Indonesia Melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* Terhadap Peningkatan Kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)?”

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui alasan diadakannya IUSSD.
2. Untuk mengetahui bagaimana kondisi kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebelum IUSSD dilaksanakan.
3. Untuk mengetahui kerjasama apa saja yang dibuat dalam IUSSD.
4. Untuk mengetahui bagaimanakah peningkatan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) pasca dilaksanakannya IUSSD.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis, untuk memperkaya khasanah pengetahuan yang lebih mendalam mengenai kerjasama pertahanan dan keamanan, khususnya kerjasama pertahanan dan keamanan Indonesia-Amerika Serikat dan memberikan wawasan lebih mendalam tentang pengaruhnya terhadap peningkatan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI).
2. Kegunaan Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan informasi dan pembelajaran bagi para penstudi masalah-masalah internasional khususnya yang terkait dengan topik penelitian yang dibahas kali ini, dan khususnya dapat berguna juga bagi peneliti sendiri untuk menambah informasi dan pengetahuan permasalahan internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis, dan Definisi Operasional

1.6.1 Kerangka Pemikiran

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antar aktor suatu negara dengan negara lainnya. Pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya pada hubungan antar negara saja, tetapi juga merupakan hubungan antar individu dengan kelompok kepentingan, sehingga negara tidak selalu sebagai aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara.

Hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia merupakan salah satu contoh dari sekian banyak fenomena yang terjadi dalam Hubungan Internasional, aktor Hubungan Internasional bisa saja merupakan aktor negara atau aktor non-negara, diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*:

> "Hubungan Internasional didefinisikan sebagai studi tentang interaksi antar beberapa faktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non-pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu" (2005: 4).

Interaksi juga bisa dilakukan antara dua negara untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia yang telah terjalin setelah Indonesia merdeka dulu, merupakan salah satu bentuk dari hubungan yang melewati batas-batas negara yang dijalin antara dua negara yang bertujuan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing.

Hubungan antara Amerika Serikat dengan Indonesia disebut sebagai hubungan diantara dua pihak yang saling memberikan respon, atau hubungan

bilateral. Pengertian hubungan bilateral diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* sebagai berikut:

> "hubungan bilateral keadaan yang menggambarkan adanya hubungan yang saling mempengaruhi atau terjadinya hubungan timbal balik antara dua pihak" (2005:42).

Hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika merupakan hubungan bilateral yang istimewa. Hal ini dikarenakan adanya beberapa kesamaan dan perbedaan antara Indonesia dan Amerika Serikat yaitu keduanya memiliki jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa dan memiliki angkatan kerja yang meningkat dari tahun ke tahun. Selain itu luas wilayah kedua negara juga sangat besar. Ada tiga masalah strategik peningkatan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat dalam bidang keamanan, yaitu *internal stability* dan *civil security*, *counter terrorism* dan *maritime security*. Amerika mendorong Indonesia untuk melaksanakan kebijakannya dan Amerika membantu Indonesia dalam bidang manajemen dan *governance* (http://www.lan-makassar.info/dokumen/Hub%20Ri-%20USA%20paper.pdf, diakses 13 Mei 2009).

Dalam menjalin suatu interaksi antar negara tidak bisa lepas dari politik luar negeri, dimana pada hakekatnya politik luar negeri bertujuan untuk meraih *national interest* yang ingin dicapai oleh suatu negara diluar batas negaranya. Tak terkecuali hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia yang memiliki tujuan bagi kepentingan nasionalnya masing-masing. Dan pengertian politik luar negeri diungkapkan oleh Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani dalam bukunya *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* sebagai berikut:

> “politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional” (2005: 47).

Dalam usaha sebuah negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama, dalam kerjasama ini terdapat kepentingan-kepentingan nasional yang bertemu dan tidak bisa dipenuhi di negaranya sendiri. Kerjasama menurut Holsti:

> “Kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan perjanjian atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak” (1988: 209).

Dan Kerjasama Internasional menurut Kartasasmita dijelaskan dalam bukunya *Administrasi Internasional* sebagai berikut:

> "kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambahnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional (1997: 19).

Indonesia merasa perlu bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan bantuan dalam upaya meningkatkan kapabilitas TNI sebagai salah satu pihak utama dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan Amerika Serikat perlu membantu karena Indonesia merupakan negara yang memiliki peran bagi eksistensi Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama tersebut juga merupakan langkah untuk mempererat hubungan kedua negara.

Hubungan bilateral yang dijalin Amerika Serikat dengan Indonesia dalam penelitian ini adalah tentang pertahanan dan keamanan. Pengertian Pertahanan nasional yang dikutip dari *www.dephan.go.id* adalah :

> "1) Segala usaha untuk mencegah dan menangkis lawan, melindungi dan membela kepentingan nasional terhadap segala macam paksaan dengan kekerasan dan serangan dari pihak lain. 2) Kekuatan, kemampuan, daya tahan, dan keuletan yang menjadi tujuan suatu bangsa untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar ataupun dari dalam, yang secara langsung atau tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara" (http://www.dephan.go.id /modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=54, diakses 29 Maret 2009).

Sedangkan konsep keamanan seperti yang dikutip dari *Encyclopedia of the Social Sciences* oleh Dr. Kusnanto Anggoro dalam *Makalah Pembanding Seminar Pembangunan Hukum Nasional VllI* didefinisikan sebagai berikut:

> "kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar" (2003: 2).

Salah satu wujud kerjasama pertahanan dan keamanan antara Amerika Serikat-Indonesia adalah dengan mengadakan *Security Dialogue*, yang dimaksudkan agar kedua negara bisa berkomunikasi tentang berbagai masalah dalam bidang pertahanan dan keamanan, dan bisa menentukan langkah yang akan ditempuh guna menyelesaikan masalah selanjutnya. Konsep *Security Dialogue* dijelaskan oleh J. Peter Burgess sebagai berikut:

> "mengamati dan meninjau secara penuh rencana jurnal internasional serta mencari cara untuk mengkombinasikan analisis teori kontemporer dengan tantangan kebijakan publik dalam pembelajaran tentang keamanan yang berseberangan. Oleh karena itu, konsep keamanan harus dilihat dan dituangkan kembali melalui pendekatan atau metodologi baru" (http://www.prio.no/ Research-and-Publications/Security-Dialogue/, diakses 29 Maret 2009).

Sementara kapabilitas TNI merupakan kemampuan yang dimiliki TNI sebagai ujung tombak pertahanan dan keamanan negara, dan harus ditingkatkan agar dapat terus mendukung kedaulatan NKRI serta untuk menanggulangi segala gangguan keamanan yang berasal dari dalam dan luar negeri atau kawasan. Definisi kapabilitas dalam *www.TheFreeDictionary.com* diartikan sebagai berikut:

> "bakat atau kemampuan yang memiliki potensi untuk digunakan atau dikembangkan" (http://www.thefreedictionary.com/capa bility, diakses 16 Mei 2009).

Dalam hal ini, kapabilitas yang dimaksud adalah kapabilitas militer. Kapabilitas militer suatu negara dapat dikembangkan terus sesuai dengan perkembangan yang terjadi di dunia. Seperti TNI, baik Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Angkatan Darat dapat terus dikembangkan kemampuan personil, jumlah Alutsista maupun anggaran pertahanannya. Dijelaskan juga dalam *www.TheFreeDictionary.com*, kapabilitas militer dijelaskan sebagai berikut:

> "Kemampuan untuk mencapai tujuan perang yang tepat sasaran (memenangkan perang atau pertempuran, menghancurkan sasaran). Hal ini termasuk ke dalam empat komponen utama.
>
> (1) Struktur pertahanan, jumlah personil, ukuran pasukan, dan komposisi unit yang terdiri dari beberapa divisi kekuatan pertahanan, seperti angkatan laut dan angkatan udara. (2) Modernisasi, kekuatan kecanggihan secara teknis, pasukan, sistem persenjataan, dan perlengkapan. (3) Kesiapan Pasukan, kesiapan untuk menyediakan kapabilitas yang diperlukan oleh komandan pasukan untuk menjalankan tugas yang diberikan. Hal ini berdasarkan dari kemampuan setiap personil yang telah dirancang untuk hasil yang diinginkan. (4) Pengendalian, kemampuan untuk mengatur tingkatan yang diperlukan dan durasi aktifitas operasional untuk mencapai tujuan militer. Pengendalian adalah fungsi untuk menyediakan dan menjaga tingkat kesiapan pasukan, material, dan keperluan yang dipakai untuk mendukung kebutuhan militer" (http://www. thefreedictionary.com /military+capability, diakses 16 Mei 2009).

Dengan pengertian tadi, kapabilitas TNI menjadi suatu modal yang harus terus ditingkatkan agar sesuai dengan perkembangan atau dinamisasi yang terjadi dalam perpolitikan dunia maupun keadaan dalam negeri Indonesia sendiri.

Amerika Serikat berperan dalam memberikan pengaruhnya terhadap kehidupan politik Indonesia, tak terkecuali dalam kerjasama pertahanan dan keamanan untuk meningkatkan kapabilitas TNI, menurut Holsti dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* karangan Perwita dan Yani konsep pengaruh didefinisikan sebagai:

> "Kemampuan pelaku politik untuk mempengaruhi tingkah laku orang dalam cara yang dikehendaki oleh pelaku tersebut. Konsep pengaruh merupakan salah satu aspek kekuasaan yang pada dasarnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan" (2005 : 31).

Kerjasama pertahanan dan keamanan tersebut memiliki pengaruh yang dengan adanya dialog, latihan bersama kedua negara, dan bantuan yang diberikan Amerika Serikat terhadap TNI. Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama memperoleh keuntungan bagi kepentingan masing-masing, Indonesia bagi pertahanan dan keamanannya dan Amerika Serikat bagi eksistensinya di kawasan.

1.6.2 Hipotesis

Pengertian hipotesis sendiri yaitu bisa diartikan sebagai jawaban sementara atau dugaan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan, dimana materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berfikir yang dikembangkan (Suriasumantri, 1998: 312).

Berdasarkan atas penjelasan yang terdapat dalam identifikasi masalah, pembatasan masalah serta kerangka pemikiran, maka peneliti menarik hipotesis sebagai berikut:

"Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Amerika Serikat melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* diaplikasikan melalui dialog, latihan bersama, dan bantuan militer sehingga memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)".

1.6.3 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan serangkaian prosedur yang mendeskripsikan kegiatan yang harus dilakukan kalau kita hendak mengetahui eksitensi empiris atau derajat eksistensi suatu konsep dijabarkan. Dengan demikian definisi operasional merupakan jembatan antara tingkat konseptual teoritis dengan tingkat observasional-empiris. Definisi ini mengatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diamati untuk membawa fenomena yang didefinisikan itu kedalam jangkauan pengalaman inderawi peneliti yang bersangkutan (Mas'oed, 1994: 100).

Berdasarkan hipotesis yang telah diselesaikan oleh peneliti maka definisi operasional dari hipotesis atas "Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Indonesia-Amerika Serikat melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* diaplikasikan melalui dialog, latihan bersama, dan bantuan militer sehingga memberikan

pengaruh terhadap peningkatan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)" adalah sebagai berikut :

1. Dialog yang dilaksanakan Indonesia dan Amerika Serikat merupakan langkah kedua negara untuk melanjutkan kerjasama yang terhenti sejak peristiwa berdarah di Santa Cruz, Timor Timur tahun 1991. Dialog ini bertujuan membangun suatu saluran komunikasi dua arah antar Departemen Pertahanan dan institusi militer kedua negara, menciptakan sarana kepada pejabat pemerintah kedua negara untuk dapat saling bertukar pandangan dalam lingkup yang luas mengenai strategi keamanan nasional dan pertahanan, adanya pemahaman yang lebih dalam tentang persepsi, konsepsi bahkan mengenai strategi keamanan nasional kedua negara, dan menghasilkan masukan-masukan yang positif bagi pemerintah masing-masing sebagai bahan untuk menentukan kebijakan politik selanjutnya.
2. Latihan bersama merupakan salah satu realisasi dari dialog yang diadakan Indonesia dan Amerika Serikat, latihan bersama ini membantu meningkatkan kemampuan teknis personil TNI. Indonesia juga mengikuti latihan bersama dengan peserta negara lain yang diadakan Amerika Serikat, latihan tersebut meliputi latihan kesigapan dan kerjasama di laut, latihan bantuan bencana alam.
3. Bantuan militer merupakan realisasi yang diberikan kepada militer Indonesia. Militer Indonesia mendapatkan dana bantuan dari Amerika Serikat melalui program IMET dan FMF. Dana bantuan militer ini dipergunakan untuk mendukung proses pendidikan personil TNI dan pembelian perlengkapan

militer, meskipun bantuan militer melalui kedua program ini pernah dihentikan, tetapi pada tahun 2002 bantuan militer melalui program IMET dipulihkan kembali dan pada tahun 2006 bantuan militer melalui program FMF dibuka kembali.

4. Kerjasama Amerika Serikat-Indonesia melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* yang diadakan semenjak tahun 2002 sampai 2008 menjadi usaha kedua negara untuk saling bertukar pandangan dan informasi seputar masalah keamanan untuk menentukan langkah kebijakan politik selanjutnya. Dialog ini rutin diadakan oleh kedua negara setahun sekali dengan lokasi dan waktu yang bergantian.
5. Untuk meningkatkan kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI), Indonesia memanfaatkan hubungan yang telah terjalin dengan Amerika Serikat dengan mengadakan kerjasama antar institusi militer yaitu dengan mengadakan dialog keamanan, yang selanjutnya diaplikasikan dalam program latihan bersama dengan militer Amerika Serikat dan bantuan militer yang diberikan terhadap TNI dari Amerika Serikat. Hal tersebut menjadi pendorong bagi TNI untuk terus meningkatkan kemampuannya dalam pertahanan dan keamanan.

1.7 Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis yang menjelaskan hubungan kausalitas antara variabel yang ada lewat studi literatur dan tinjauan pustaka.

Metode deskriptif analitis adalah suatu metode untuk menggambarkan kenyataan dan situasi berdasarkan data yang satu dengan data yang lain berdasarkan pada teori dan konsep-konsep yang digunakan (Bailey, 1987 : 38). Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dimana peneliti menjelaskan permasalahan berdasarkan data yang dikumpulkan, disusun dan kemudian di analisa.

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penyusunan Skripsi ini yaitu dengan menggunakan studi dokumen, yaitu dimana peneliti menggunakan data yang berasal dari referensi perpustakaan, internet dan jurnal-jurnal yang berkaitan.

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.8.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di beberapa perpustakaan, antara lain:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
3. Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung.
4. Perpustakaan Pusat Kajian Wilayah Amerika Serikat Universitas Indonesia, Jakarta.
5. Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jakarta.

1.8.2 Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk pra penelitian (tahap pengenalan, pemahaman dan pendalaman masalah) yaitu dimulai sejak bulan Februari 2009 dan direncanakan selesai pada bulan Juli 2009. Untuk mengetahui lebih jelasnya, peneliti membuat *Time Schedule* untuk rencana kegiatan penelitian ini.

Tabel 1.2
Bagan *Time Schedule*

No	Waktu / Kegiatan	Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agust			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																								
2	ACC Judul																								
3	Bimbingan																								
4	ACC UP																								
5	Sidang UP																								
7	Penelitian																								
8	Sidang Skripsi																								
9	Wisuda Sarjana																								

1.9 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang disesuaikan dengan pembahasan yang dilakukan. Sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Merupakan Bab Pendahuluan yang berisikan pemaparan tentang latar belakang penelitian, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, hipotesis dan definisi operasional, metodologi penelitian,

juga dilengkapi dengan teknik pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan Bab Tinjauan Studi Pustaka yang memuat pendekatan, teori dan konsep dalam studi Hubungan Internasional yang relevan untuk menganalisis permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hubungan Internasional, Hubungan Bilateral, Politik Luar Negeri, Kerjasama Internasional, Konsep Pertahanan dan Keamanan, *Power*, *Security Dialogue*, Konsep Kapabilitas, Kapabilitas Militer, Dan Konsep Pengaruh.

Bab III : Objek Penelitian, pada bab ini membahas objek-objek penelitian yang terdapat pada penelitian yang berjudul "Pengaruh Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat-Indonesia Melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* Terhadap Peningkatan Kapabilitas Tentara Nasional Indonesia (TNI)", objek penelitiannya meliputi Sejarah Kerjasama Pertahanan dan Keamanan Amerika Serikat-Indonesia Pra Embargo Militer Amerika Serikat, Pasca Embargo Militer Amerika Serikat, IUSSD I - IUSSD VI, Postur TNI, dan Anggaran Pertahanan.

Bab IV : Pembahasan, pada bab ini berisi mengenai pembahasan tentang penelitian yaitu bagaimana pengaruh kerjasama pertahanan dan keamanan Amerika Serikat-Indonesia melalui *Indonesia-U.S. Security Dialogue (IUSSD)* terhadap peningkatan kapabilitas Tentara

Nasional Indonesia (TNI). Pembahasannya meliputi Realisasi IUSSD, Kendala-kendala Dalam Merealisasikan IUSSD, Evaluasi Peningkatan Kapabilitas Tentara Nasional Indonesia.

Bab V : Merupakan bab Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan merupakan akhir dari proses penelitian yang telah dilakukan yang menunjukkan apakah hipotesis yang telah disusun dapat diterima atau ditolak. Saran berisikan usulan-usulan bagi peneliti yang berminat untuk menggali lebih jauh mengenai objek penelitian yang serupa.